DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING *Volume 14, Nomor 3, Tahun 2025, Halaman 1-13*
http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting ***ISSN (Online): 2337-3806***

PENGARUH *WHISTLEBLOWING* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI

(Studi Empiris pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)

Rachmatika Ane Riane, Siti Mutmainah [1]
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to test hypotheses and produce empirical findings related to the effect of whistleblowing and internal control on corruption prevention at the Inspectorate of Central Java Province. This study uses primary data using a questionnaire with purposive sampling technique. The number of samples was 50 samples. Hypothesis testing in this study uses multiple linear regression analysis with the help of the SPSS version23 program.

The independent variables used are whistleblowing and internal control. The indicators used to measure whistleblowing use the guidelines of the National Committee on Governance Policy (2008), while internal control is measured by Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

The dependent variable in the form of corruption prevention is measured using the proxy of the fraud diamond. The results showed that whistleblowing has a negative effect on corruption prevention, while internal control has an effect on corruption prevention.

Keywords: whistleblowing, internal control, and corruption prevention.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang terus menghambat pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. *Laporan Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2024) dalam *Report to The Nations* menyebutkan bahwa dari 1.921 kasus *fraud* yang dianalisis secara global, sebanyak 48% melibatkan unsur korupsi, dengan total kerugian yang ditimbulkan mencapai $3,1 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan bentuk kecurangan yang paling dominan dan merugikan, terutama di sektor pemerintahan.

Indonesia sendiri belum menunjukkan capaian signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 tercatat hanya sebesar 34 dan menempati peringkat ke-110 dari 180 negara (*Transparency International*, 2024). Meskipun pada tahun 2024 skor ini meningkat menjadi 37, namun perbaikan tersebut masih belum mampu mengangkat Indonesia dari kategori negara dengan tingkat korupsi tinggi. Hal ini menandakan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius di berbagai sektor, termasuk sektor publik.

Upaya pencegahan korupsi menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Salah satu pendekatan preventif yang direkomendasikan oleh ACFE adalah penerapan *whistleblowing* system, yaitu mekanisme pelaporan pelanggaran oleh pihak internal maupun eksternal organisasi. ACFE (2024) mencatat bahwa 43% kasus *fraud* terungkap melalui laporan dari pelapor, mayoritas berasal dari kalangan pegawai internal (52%). Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal juga dipandang strategis dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas organisasi, serta meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan (COSO, 2017; Tuanakotta, 2010).

[1] *Corresponding author*

Dalam konteks nasional, Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2024 menghasilkan skor nasional sebesar 71,53. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah mencatatkan capaian SPI yang tinggi, yaitu 79,5, dan menjadi provinsi dengan indeks integritas tertinggi untuk kategori provinsi tipe besar. Tingginya skor SPI ini secara teoritis menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki sistem pengawasan internal yang baik, kanal pelaporan yang berjalan, serta risiko korupsi yang rendah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Data dari ICW dan Kejaksaan Tinggi menyebutkan bahwa jumlah kasus korupsi di Jawa Tengah meningkat dari 47 kasus pada tahun 2023 menjadi 73 kasus pada tahun 2024, dengan kerugian negara mencapai Rp207 miliar. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara nilai integritas yang terukur secara formal dengan implementasi pengendalian antikorupsi yang berjalan secara nyata di lapangan. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperkuat kebijakan pengendalian korupsi melalui dua peraturan terbaru: (1) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing* System), dan (2) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Namun, efektivitas dari kedua kebijakan tersebut masih belum banyak dikaji secara empiris, khususnya di lembaga pengawasan seperti Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana pengaruh *whistleblowing* dan pengendalian internal terhadap pencegahan korupsi, khususnya di lingkungan Inspektorat. Fokus pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menjadi penting karena lembaga ini memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi lokus implementasi langsung kebijakan SPIP dan sistem *whistleblowing*.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam menilai efektivitas dua instrumen utama pencegahan korupsi—*whistleblowing* dan pengendalian internal serta menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara pihak principal (pemberi wewenang) dan agen (penerima wewenang), di mana keduanya memiliki kepentingan yang berbeda dalam suatu kontrak kerja. Perbedaan kepentingan ini sering menimbulkan konflik karena principal sulit memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan harapan mereka. Dalam konteks organisasi publik, pemerintah bertindak sebagai principal yang memberikan mandat kepada agen, dalam hal ini pegawai instansi seperti Inspektorat, untuk mengelola sumber daya dan menjalankan tugas pengawasan.

Kesenjangan informasi dalam organisasi, serta (3) informasi dipandang sebagai komoditas yang bernilai. Ketiga asumsi ini melandasi munculnya asimetri informasi, yaitu kondisi di mana agen memiliki informasi yang tidak sepenuhnya diketahui oleh principal. Ketidakseimbangan informasi ini menyulitkan principal dalam mengevaluasi kinerja agen secara objektif. Teori agensi menjelaskan hubungan antara principal dan agen, yang memiliki kepentingan berbeda dalam menjalankan suatu kontrak. Dalam sektor publik, pemerintah bertindak sebagai principal, sementara aparatur sipil negara termasuk pegawai Inspektorat sebagai agen. Konflik dapat terjadi karena agen memiliki akses informasi yang lebih luas daripada principal (asimetri informasi), sehingga membuka peluang bagi perilaku oportunistik, seperti penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Untuk mengurangi risiko ini, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat.

Whistleblowing dan pengendalian internal merupakan dua instrumen penting dalam menjembatani kesenjangan informasi tersebut. Pengendalian internal berfungsi sebagai sistem formal untuk mengatur, memantau, dan mengevaluasi aktivitas organisasi agar selaras dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sementara itu, *whistleblowing* memberi kesempatan bagi agen lain atau pihak internal untuk melaporkan pelanggaran yang tidak terdeteksi oleh sistem

pengawasan biasa. Dalam konteks teori agensi, keduanya berperan dalam mengurangi informasi yang timpang, menekan perilaku menyimpang, serta memastikan bahwa kebijakan dan sumber daya organisasi digunakan secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, implementasi yang efektif dari *whistleblowing* dan pengendalian internal dapat memperkuat akuntabilitas agen kepada principal, serta menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi yang relevan di instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Inspektorat.

Teori *Fraud Diamond*

Teori *Fraud Diamond* yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson menambahkan elemen keempat dalam pemicu terjadinya kecurangan, yaitu kapabilitas, selain tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Kapabilitas mencerminkan kemampuan individu untuk mengeksekusi dan menyembunyikan kecurangan, yang didukung oleh jabatan strategis, kecerdasan, kepercayaan diri, serta kemampuan memanipulasi orang lain. Dalam konteks organisasi publik seperti Inspektorat, lemahnya pengawasan dan pengendalian internal menciptakan celah bagi individu berkapabilitas tinggi untuk melakukan korupsi.

Penerapan pengendalian internal yang ketat dan sistem *whistleblowing* yang efektif sangat penting untuk membatasi faktor kesempatan dan kapabilitas ini. Kanal pelaporan pelanggaran dapat menurunkan keberanian pelaku karena meningkatnya risiko terdeteksi, sementara budaya organisasi yang menjunjung integritas membantu menekan rasionalisasi tindakan koruptif. Dengan demikian, teori *Fraud Diamond* memberikan landasan teoritis yang kuat bahwa upaya pencegahan korupsi harus mencakup penguatan pengawasan internal, sistem pelaporan, dan nilai-nilai etika dalam organisasi.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

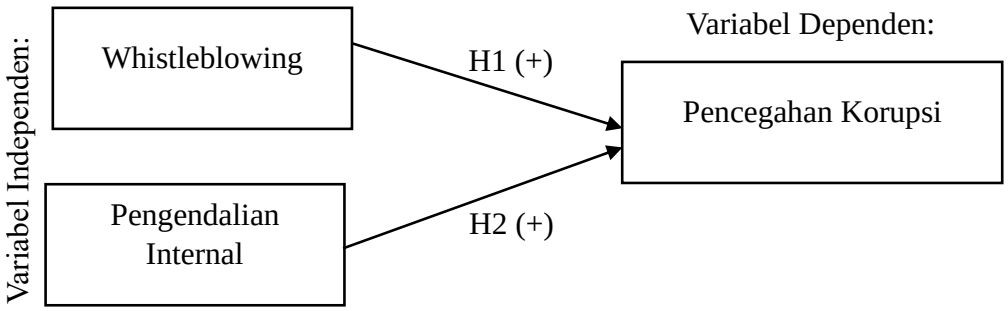

H_1: *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi
H2: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi

Perumusan Hipotesis

Pengaruh *Whistleblowing* terhadap pencegahan korupsi.

Whistleblowing adalah tindakan pelaporan atas dugaan pelanggaran hukum atau penyimpangan etika yang dilakukan oleh individu dalam atau luar organisasi. Dalam konteks sektor publik, *whistleblowing* menjadi salah satu mekanisme strategis untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Teori agensi menempatkan *whistleblowing* sebagai alat untuk mengatasi asimetri informasi antara principal dan agen, sementara dalam teori *fraud diamond*, sistem ini berperan dalam mengurangi kesempatan (opportunity) untuk berbuat curang.

Laporan ACFE (2024) menyebutkan bahwa 43% kasus *fraud* berhasil diungkap melalui pelaporan whistleblower, menjadikannya alat pendeteksi paling efektif. Di Indonesia, efektivitas *whistleblowing* semakin ditekankan melalui SPI (Survei Penilaian Integritas) yang digunakan oleh KPK untuk menilai tingkat integritas dan potensi risiko korupsi suatu instansi. Tingginya skor SPI di Jawa Tengah diharapkan sejalan dengan keberfungsian sistem pelaporan yang baik.

Penelitian sebelumnya oleh Lanrewaju & Dare (2018) dan Dinia & Rosyid (2022) juga menunjukkan bahwa *whistleblowing* secara signifikan berpengaruh terhadap upaya pencegahan korupsi. Maka dari itu, berdasarkan teori dan temuan empiris, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:
H1: *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Korupsi

Korupsi merupakan bentuk *fraud* yang mengancam stabilitas keuangan negara dan memperlemah tata kelola pemerintahan. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah korupsi adalah melalui penguatan sistem pengendalian internal. Menurut teori *fraud diamond* (Wolfe & Hermanson, 2004), lemahnya pengendalian internal menciptakan peluang (*opportunity*) bagi individu untuk melakukan penyimpangan. Sementara itu, dalam teori agensi, pengendalian internal berperan penting sebagai alat monitoring untuk mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan agen.

Penguatan sistem ini mampu meningkatkan transparansi, mempersempit ruang manipulasi, serta menjaga agar perilaku agen tetap sesuai dengan tujuan organisasi. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Zang et al. (2007), Sari et al. (2021), dan Hamid & Nasih (2021), menunjukkan bahwa pengendalian internal secara signifikan berkontribusi terhadap pencegahan tindakan korupsi.

Selain itu, dalam konteks SPI (Survei Penilaian Integritas), tingginya skor SPI pada suatu instansi umumnya berkorelasi dengan penguatan pengawasan internal yang efektif. Oleh karena itu, berdasarkan landasan teori dan temuan empiris tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:
H2**:** Penngendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi.

METODE PENELITIAN

Variabel dan Pengukurannya

PeneIitian ini menggunakan variabel independen *whistleblowing* dan pengendalian internal serta variabel dependen pencegahan korupsi. variabel *whistleblowing* diukur menggunakan tiga aspek yang didasarkan pada Pedoman Sistem Pelaporan milik Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2008 dan variabel pengendalian internal dinilai dengan lima aspek berdasarkan komponen pengendalian internal yang tercantum dalam COSO *Internal Control Framewor*k. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

Tabel 1
Variabel & Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Independen		
Whistleblowing	X1	Pedoman Sistem Pelaporan KNKG (2008) mencakup tiga aspek utama, yaitu struktural, operasional, dan perawatan.
Pengendalian Internal	X2	Lima komponen COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pengawasan.
Variabel Dependen		
Pencegahan Korupsi	Y	Lima indikator, yaitu pencegahan terhadap tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, dan integritas.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan wilayah yang mencakup objek dan subjek yang memiliki karakteristik serta kriteria tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang valid (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 132 orang, sebagaimana tercantum di situs resmi instansi tersebut. Pemilihan populasi ini didasarkan pada peran strategis mereka sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengimplementasikan pengendalian internal dan sistem *whistleblowing*, terutama pasca diberlakukannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2023.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu (Sugiyono, 2013). Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, dalam hal ini pegawai yang telah bekerja lebih dari lima tahun. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan relevan. Penentuan jumlah sampel mengacu pada Roscoe (1975) yang merekomendasikan ukuran sampel antara 30 hingga 500, terutama untuk analisis multivariat seperti regresi berganda**.**

Metode Analisis

Model regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS yang menghasilkan persamaan regresi guna menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang dianalisis.:

$$Y = \beta0 + \beta1X1 + \beta2X2 + e$$

Keterangan:

Y	= Pencegahan Korupsi
β0	= Konstanta
β1, β2	= Koefisien regresi
X1	= *Whistleblowing* system
X2	= Pengendalian Internal
e	= Standard error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Teoritis					Aktual				
	N	Min	Max	Median	Mean	Min	Max	Median	Mean	Std. Deviation
X1	50	11	55	33	33	33	54	46	45,78	4,617
X2	50	34	85	59,5	59,5	50	85	74	73,54	9,594
Y	50	10	50	30	30	30	48	40	39,66	5,017

Sumber: Output SPSS 23, Data Skunder yang diolah tahun 2025

Sebelum menarik kesimpulan dari hasil analisis deskriptif, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan rentang teoritis dari masing-masing variabel yang diteliti. Rentang ini dihitung dengan mengalikan jumlah item pernyataan dengan skala Likert yang digunakan (1–5), sehingga dapat diketahui batas minimum dan maksimum teoritis, yang kemudian menjadi dasar dalam mengklasifikasikan hasil ke dalam kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Klasifikasi ini juga membantu dalam memahami posisi skor aktual terhadap ekspektasi teoritis dan memberikan gambaran umum mengenai pola persepsi responden.

Variabel pertama, yaitu *whistleblowing* (X1), terdiri dari 11 item pernyataan, sehingga memiliki nilai teoritis minimum 11 dan maksimum 55. Hasil aktual menunjukkan skor rata-rata 45,78 dan median sebesar 46, keduanya masuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki pemahaman yang baik dan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pelaporan pelanggaran, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang maupun indikasi korupsi. Standar deviasi sebesar 4,617 tergolong rendah, yang menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap mekanisme *whistleblowing* cukup seragam.

Untuk variabel pengendalian internal (X2), yang mencakup 17 pernyataan, nilai minimum teoritis adalah 34 dan maksimum 85. Hasil aktual menunjukkan skor rata-rata sebesar 73,54 dan median 74, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Ini mencerminkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan di Inspektorat telah dijalankan dengan baik menurut persepsi pegawai, terutama dalam aspek prosedur kerja, pembagian tugas, pengawasan internal, serta komunikasi organisasi. Meskipun demikian, standar deviasi sebesar 9,594 tergolong tinggi,

menunjukkan adanya perbedaan persepsi antarresponden, yang kemungkinan dipengaruhi oleh variasi posisi jabatan, unit kerja, atau pengalaman kerja yang berbeda.

Sedangkan untuk variabel pencegahan korupsi (Y), dengan jumlah 10 pernyataan, memiliki rentang teoritis antara 10 hingga 50. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 39,66 dengan median sebesar 40, dan standar deviasi sebesar 5,017. Rata-rata skor tersebut masuk dalam kategori tinggi, mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa berbagai upaya pencegahan korupsi, baik melalui pengawasan, kepatuhan terhadap prosedur, maupun peningkatan integritas, telah dijalankan secara cukup efektif oleh instansi. Meskipun belum mencapai kategori sangat tinggi, hasil ini sudah menunjukkan adanya persepsi positif terhadap iklim antikorupsi di lingkungan kerja.

Bila dikaitkan dengan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh skor 79,5 dan menempati salah satu peringkat tertinggi di tingkat nasional. Temuan deskriptif ini memperkuat data SPI, karena persepsi pegawai terhadap *whistleblowing* dan pengendalian internal berada dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi. Namun demikian, meningkatnya jumlah kasus korupsi di wilayah Jawa Tengah pada tahun yang sama menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi dan praktik aktual. Ini menandakan bahwa meskipun kesadaran dan sistem sudah cukup memadai dari sisi perseptual, efektivitasnya dalam implementasi masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini menegaskan bahwa budaya pelaporan pelanggaran dan pengendalian internal di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sudah mulai terbangun dan dipahami dengan baik. Namun, tantangan utama ke depan adalah menjembatani kesenjangan antara persepsi positif ini dengan praktik nyata di lapangan melalui penguatan pelaksanaan kebijakan, sistem pengawasan, serta komitmen berkelanjutan terhadap integritas dan transparansi.

Uji *NonResponse Bias*

Uji non-response bias dilakukan untuk memeriksa apakah ada perbedaan antara dua kelompok responden. Analisis ini menggunakan metode Independent Sample t-Test

Tabel 3
Hasil Uji *Non-Response Bias*

Variabel	Kelompok	N	LevenTest		Asumsi	t-test	Kesimpulan
			F	Sig.		t	
X1 (*Whistleblowing*)	Awal	10	0,16	0,69	*equal variance assumed*	0,06	Tidak Ada Perbedaan
	Akhir	40					
X2 (Pengendalian Internal)	Awal	10	0,92	0,34	*equal variance assumed*	0,20	Tidak Ada Perbedaan
	Akhir	40					
Y (Pencegahan Korupsi)	Awal	10	0,82	0,37	*equal variance assumed*	0,46	Tidak Ada Perbedaan
	Akhir	40					

Sumber: Output SPSS 23, Data Skunder yang diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil uji *Levene* yang ditampilkan pada Tabel 4.3, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 *whistleblowing* (X1) sebesar 0,69, pengendalian internal (X2) sebesar 0,34, dan pencegahan korupsi (Y) sebesar 0,37. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi homogenitas varians, artinya varian antar kelompok responden adalah sama. Selanjutnya, hasil uji Independent Sample t-*test* menunjukkan nilai signifikansi masing-masing variabel juga lebih dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tanggapan responden yang diperoleh pada awal dan akhir waktu pengumpulan data. Oleh karena itu, data dapat dianggap stabil dan konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Glesjer (Uji Heterokesdasitas)

Model	Uji Normalitas	Uji Multikolinieritas		Uji Glesjer	
		Tolerance	VIF	t	Sig
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200[c,d]				
1(Constant)				-0,820	0,416
X1 (*Whistleblowing*)		.579	1,728	0,199	0,843
X2 (Pengendalian Internal)		.579	1,728	1,431	0,159

Sumber: Output SPSS 23, Data Skunder yang diolah tahun 2025

Hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,2 (> 0,05), menandakan data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan semua variabel memiliki nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, sehingga tidak terdapat multikolinearitas. Sementara itu, hasil uji heteroskedastisitas melalui scatterplot memperlihatkan penyebaran data yang acak dan merata, yang berarti model bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengukur hubungan dan kekuatan pengaruh antara variabel independen dan dependen. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% melalui uji simultan (F), uji determinasi (R^2), dan uji parsial (t), yang hasilnya disajikan dalam tabel berikut.

Uji Simultan (F-*test*)

Uji signifikansi simultan dilakukan untuk mengetahui apaka model regresi yang digunakan adalah model yang fit atau tidak.

Tabel 5
Hasil Uji Signifikansi Simultan (F-*test*)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	825.847	2	412.924	47.640	.000[b]
	Residual	407.373	47	8.668		
	Total	1233.220	49			

Sumber: Output SPSS 23, Data Skunder yang diolah tahun 2025

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan korupsi (F = 47,640; sig. = 0,000 < 0,05).

Uji Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur seberapa baik model penelitian dapat menjelaskan variabilitas pada variabel dependen (Ghozali, 2016).

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.818[a]	.670	.656	2.94406

Sumber: Output SPSS 23, Data Skunder yang diolah tahun 2025

Hasil uji R^2 menunjukkan bahwa *whistleblowing* dan pengendalian internal menjelaskan 65,6% variasi pencegahan korupsi, sementara 34,4% dipengaruhi faktor lain di luar model.

Uji Signifikasi Parameter Individual (t-*test*)

Tabel 7
Hasil Uji t-*test*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	42,209	4,246		9,942	,000
X1	-,937	0,120	-,862	-7,823	,000
X2	,549	0,058	1,049	9,519	,000

Sumber: Output SPSS 23, Data Skunder yang diolah tahun 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan korupsi, sehingga hipotesis pertama ditolak. Sebaliknya, variabel pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan korupsi, sehingga hipotesis kedua diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *whistleblowing* berpengaruh negatif terhadap pencegahan korupsi di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem *whistleblowing* belum berjalan efektif, ditandai oleh rendahnya persepsi terhadap independensi pengelola, minimnya sosialisasi, pelatihan, serta evaluasi sistem secara berkelanjutan. Akibatnya, *whistleblowing* belum mampu berfungsi optimal sebagai alat pencegah korupsi. Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menyoroti celah asimetri informasi, dan bertentangan dengan teori *fraud diamond* yang menyatakan *whistleblowing* dapat memperkecil peluang korupsi. Hasil ini juga konsisten dengan temuan Said et al. (2018), namun berbeda dari Wardana et al. (2017) dan Suharto (2020) yang menemukan pengaruh positif *whistleblowing* terhadap pencegahan korupsi**.**

Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan korupsi

Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan korupsi di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menekankan pentingnya pengawasan dalam mengatasi asimetri informasi, serta teori *fraud diamond* yang menyebut kontrol internal sebagai penghambat kesempatan untuk berbuat curang. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat memperjelas pembagian tugas, memperkuat akuntabilitas, dan menekan potensi penyimpangan. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya seperti oleh Shanmugam et al. (2012), Sow et al. (2018), Wardana et al. (2017), dan Zakaria et al. (2010), yang menunjukkan bahwa pengendalian internal yang kuat mampu meminimalisir peluang terjadinya korupsi.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *whistleblowing* memiliki pengaruh negatif terhadap pencegahan korupsi di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem pelaporan pelanggaran belum sepenuhnya berjalan efektif sebagai mekanisme pencegahan. Faktor-faktor seperti kurangnya pelatihan, minimnya publikasi prosedur, tidak adanya evaluasi rutin, serta ketidakpercayaan terhadap independensi pengelola sistem menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas *whistleblowing*. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun sistem tersebut telah tersedia secara struktural, namun secara fungsional belum mampu menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi pelapor. Oleh karena itu, agar *whistleblowing* dapat berfungsi optimal, diperlukan perbaikan dalam hal struktur kelembagaan, jaminan kerahasiaan, sosialisasi yang lebih luas, dan penguatan budaya organisasi yang mendukung keberanian melapor.

Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan korupsi. Penerapan sistem pengawasan yang terstruktur,

audit yang rutin, pembagian wewenang yang jelas, dan kepatuhan terhadap prosedur terbukti mampu mempersempit celah terjadinya penyimpangan. Temuan ini sejalan dengan teori agensi dan *fraud diamond*, yang menekankan pentingnya kontrol internal dalam mengurangi peluang dan mencegah moral hazard. Dengan meningkatnya kualitas pelaksanaan pengendalian internal, organisasi menjadi lebih mampu menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal perlu terus dilakukan melalui evaluasi maturitas SPIP, peningkatan kapasitas SDM, serta pembinaan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem formal seperti *whistleblowing* dan pengendalian internal, tetapi juga pada sejauh mana sistem tersebut diimplementasikan secara konsisten, profesional, dan didukung oleh budaya integritas yang kuat. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam mengevaluasi kebijakan internal serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengawasan dan pelaporan di lingkungan Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa keterbatasan yang didapatkan, diantaranya:

1. Partisipasi responden terbatas, sehingga data yang diperoleh kurang mewakili keseluruhan populasi.
2. Waktu pengumpulan data yang singkat menyebabkan peneliti kesulitan melakukan tindak lanjut terhadap responden yang belum mengisi kuesioner.
3. Metode pengumpulan data hanya menggunakan kuesioner tertutup, sehingga informasi yang didapat terbatas dan tidak menggambarkan pendapat mendalam dari responden.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan mempertimbangkan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi responden, dengan memperluas metode penyebaran kuesioner seperti melalui media digital, komunikasi langsung, atau kerja sama dengan atasan responden.
2. Menambah waktu pengumpulan data, agar peneliti memiliki kesempatan melakukan follow-up dan memperoleh data yang lebih lengkap.
3. Menggunakan metode campuran, seperti wawancara semi-terstruktur atau diskusi kelompok (FGD), guna melengkapi data kuantitatif dengan wawasan kualitatif yang lebih mendalam.

REFERENSI

ACFE, (2024). Occupational *Fraud* 2024: A Report to the Nations. Retrieved from https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/

ACFE, (2024). Survei *Fraud* Indonesia 2024. Retrieved from https://acfe-indonesia.or.id/2024/

Anggoe, M., & Reskino, R. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing* System, Dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi Trisakti, 10(1), 31–50. https://doi.org/10.25105/jat.v10i1.15818

Anya, S., & Iwanger, G. (2019). The Role of Whistle Blowing Policy as an Anti-Corruption Tool in Nigeria. Journal Of Law and Criminal Justice, 7(1). https://doi.org/10.15640/jlcj.v7n1a4

Arifah, A. (2012). Praktek Teori Agensi Pada Entitas Publik Dan Non Publik (Vol. 9, Issue 1).

Alatas, S. H. (2006). The myth of the lazy native (digital pr). Frank Cass and Company Limited. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=vAwbP7anCcC

Arens, A. A., Beasley, M. S., & Elder, R. J. (2010). Auditing and assurance services: An integrated approach (12th ed., International ed.). Pearson Prentice Hall.

Baswir, R. (2002). Dinamika korupsi di Indonesia dalam perspektif struktural. Jurnal Universitas Paramadina, 2(1), 25–34.

Ceva, E., & Bocchiola, M. (2020b). Theories of *whistleblowing*. Philosophy Compass, 15(1). https://doi.org/10.1111/phc3.12642

COSO. (2013). Internal Control - Integrated Framework (Issue May).

COSO. (2017). Internal Control - Integrated Framework (Issue May).

Dinia, K. N., & Rosyid, A. (2022). *Whistleblowing* System dan Lingkungan Pengendalian Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa dimoderasi Perilaku Etis. Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS), 3(2), 99–112. https://doi.org/10.28918/jaais.v3i2.5987

Effendi, M. A. (2017). The power of good corporate governance: Teori dan implementasi (2nd ed., Rosidah, Ed.). Salemba Empat.

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 14(4), 532–550. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4308385

Gholami, H., & Salihu, H. A. (2019). Combating corruption in Nigeria: the emergence of *whistleblowing* policy. In Journal of Financial Crime (Vol. 26, Issue 1, pp. 131–145). Emerald Group Publishing Ltd. https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0102

Ghozali, I. (2013). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS (7th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunawan, I. (2016). Metode penelitian kualitatif. Bumi Aksara.

Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 1(1), 53–64. https://www.researchgate.net/publication/255967655

Hamid, A., & Nasih, M. (2021). *Fraud* prevention of village funds in East Java Indonesia. Management Science Letters, 11, 2033–2044. https://doi.org/10.5267/j.msl.2021.3.006

Indonesian Corruption Watch. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.

https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Materi%20Pemaparan%20Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023%20.pdf

Iriyani, I., & Mutmainah, S. (2024). Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Integrasi e-Planning dan eBudgeting Terhadap Pencegahan Korupsi. E-Jurnal Akuntansi, 34(1), 108. https://doi.org/10.24843/eja.2024.v34.i01.p09

Irwan, S. (2017). Terjerat kasus korupsi. Komisi Agen, 2(6), 48–56. http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/LG/article/download/2845/2778

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kassem, R., & Higson, A. (2012). The new *fraud* triangle model. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 3(3), 191–195.

Kejaksaan Tinggi (2025),

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Survei Penilaian Integritas 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022a). Pedoman Pelaporan Pencapaian Aksi Pemberantan Korupsi Tahun 2022.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2008) 'Pedoman 2008', p. 3. Available at:http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-PelaporanPelanggaran *Whistleblowing*-System-WBS.pdf.

KPMG. (2013). KPMG forensic: Survey of *fraud*, bribery and corruption in Australia and New Zealand 2012.

Kuswati, E. W. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Pengendalian Internal dan *Whistleblowing* System Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi, 1(1), 66–76. https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.7

Lanrewaju, S., & Dare, M. (2018). Whistle Blowing as a Tool for Combating The Menace of *Fraud*, Forgery and Corruption in Nigeria. In International Journal of Advanced Academic Research | Social & Management Sciences | (Vol. 4, Issue 3).

Mcnally, J. S. (2013). One Approach to An Effective Transition The 2013 COSO Framework & SOX Compliance.

Miceli, M. P., & Near, J. P. (1993). Blowing the Whistle: The Organizational and Legal Implications for Companies and Employees. New York: Lexington Books, 38(4), 683–685. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2393341

Miller, S. (2014). Social institutions. In E. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/social-institutions

Nurhasanah, & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). Effectiveness of internal control, internal audit, characteristics of the institution and corruption cases. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing* System) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Pemerintah Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49359/pp-no-60-tahun-2008

Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Perangkat Daerah

Putra, A., & Muid, A. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Korupsi di Sektor Publik. Jurnal Transparansi, 14(2), 88-97

Pratiwi, N. L. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Ardianti, P. N. H. (2021). Pengaruh pengendalian internal, komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang pada rumah sakit di Kota Denpasar. Jurnal Karya Riset Mahasiswa Akuntansi, 1(3), 1001–1007.

Okafor, O. N., Adebisi, F. A., Opara, M., & Okafor, C. B. (2020). Deployment of *whistleblowing* as an accountability mechanism to curb corruption and *fraud* in a developing democracy. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 33(6), 1335–1366. https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2018-3780

Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. R. (2018). Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5(2), 117–131.

Paraswansa, A. D., & Utomo, D. C. (2024). *Whistleblowing* dan Korupsi Pada Sektor Publik: A Systematic Review. Jurnal Akademi Akuntansi, 7(1), 94–113. https://doi.org/10.22219/jaa.v7i1.31336

Puryati, D., & Febriani, S. (2020). The Consequence of *Whistleblowing* System and Internal Control toward *Fraud* Prevention: A Study on Indonesian State Owned Enterprise. In International Journal of Business and Technology Management (Vol. 2, Issue 3). http://myjms.moe.gov.my/index.php/ijbtm

Putra, M. A., Fridayanto, D., Aji, B. P., Karim, S. A., & Sudiro, S. (2022). Enhancing Efl Learners' Speaking Skills Through The Audio-Lingual Method. Journey: Journal of English Language and Pedagogy, 5(1), 30–38. https://doi.org/10.33503/journey.v5i1.1818

Rachman, I., & Dyahrini, W. (2021). The effect of internal control and organizational commitment to *fraud* prevention in Hospital X in the City of Bandung Indonesia. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(8), 1038–1043.

Rachmawati, A. F. (2021). Dampak korupsi dalam pembangunan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 12–19.

Sabeni, A. (2005). Peran akuntan dalam menegakkan governance pada perusahaan di Indonesia (Tinjauan perspektif prinsip corporate keagenan). Disampaikan pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro.

Sari, R., Su'un, M., & Nurwanah, A. (2021). Effect of internal control, *whistleblowing* role and data asymmetry against *fraud* prevention. Point of View Research Accounting and Auditing, 2(January), 92–99.

Sekaran, U. (2006). Research methods for business students: A skill-building approach. John Wiley & Sons.

Shah, A., & Schacter, M. (2004). Combating corruption: Look before you leap. Finance and Development, 41(4), 40–43.

Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud* Auditing and Forensic Auditing (4th ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Skalak, S. L. ., Golden, T., Clayton, M., & Pill, J. (2006). A Guide to Forensic Investigation. In A Guide to Forensic Accounting Investigation. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119200048.fmatter

Sofhian, S., & Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung. (2020). Causes and corruption prevention: Indonesia case. Tatar Pasundan, XIV(1), 65–76.

Sow, A. N., Basiruddin, R., Mohammad, J., & Abdul Rasid, S. Z. (2018). *Fraud* prevention in Malaysian small and medium enterprises (SMEs). Journal of Financial Crime, 25(2), 499–517. https://doi.org/10.1108/JFC-05-2017-0049

Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan tindakan (19th ed.). Alfabeta.

Suharto, S. (2020). The Effect Of Organizational Culture, Leadership Style, *Whistleblowing* Systems, And Know Your Employee On *Fraud* Prevention In Sharia Banking. Asia Pacific *Fraud* Journal, 5(1), 108. https://doi.org/10.21532/apfjournal.v5i1.141

Sukmadani, H., & Ibrahim, F. (2021). Analisis Faktor Penyebab Korupsi di Sektor Publik di Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 8(1), 45–58

Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 7(1), 161–178. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717

Transparency International. (2025). Corruption Perceptions Index 2025. https://www.transparency.org/en/cpi/2025

Von Hagen, J. (2003). Budgeting institutions and public spending. In A. Shah (Ed.), Handbook on public sector performance reviews: Volume 1: Ensuring accountability. The World Bank.

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The *fraud diamond*: Considering the four elements of *fraud*. The CPA Journal, 74(12), 38–42.

Widarjono, A. (2015). Statistika terapan dengan Excell dan SPSS (1st ed.). UPP STIM YKPN.

Wiryawan, A. P. (2016). Analisis hukum penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidananya, 1–5